

GERAKAN ISLAM KONTEKS LOKAL DAN GLOBAL; RESPON PEMIKIRAN SOSIAL POLITIK DAN EKONOMI AKTIVIS GERAKAN ISLAM DI INDONESIA

Ismatillah A. Nu'ad

Universitas Paramadina Jakarta
ismatillahnuad2@gmail.com

Abstract

Since Indonesia crisis 1997 could not be resolved entirely by the state, making social sensitivity, politics, and the global economy has grown in the Islamic society, and embodied in the form of ideas, thoughts, expressions, and actions that are represented by individuals or groups, In a progressive level, represented by the individual movement activists in Indonesia, such as Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, SI, al-Wasliyah, DDII, LDII, MMI, FPI, HTI, MT, and the Jamaah Tabligh. This study is the result of research interviews in the field on Islamic activism response to the question of social, political, economic and contemporary in Indonesia in general. From this study it can be concluded, (1) Islamic activism should be categorized re-considering the proliferation of Islamic movements and the movements of character differences between Islamic movements, new and old, especially in terms of actualization of practical politics. (2) There was a difference in the pattern and dynamics of Islamic activism of NU and Muhammadiyah with the general drift of the Islamic movement that tends to agree with the ideology of the State.

Keywords: *Islamic movement, Islamic activism, NU, Muhammadiyah, Persis, SI, Wasliyah, DDII, LDII, MMI, FPI, HTI, MT, Jamaah Tabligh*

Pendahuluan

Respon yang dilakukan aktivis Islam merupakan sebetulnya kritik terhadap ketidakberdayaan negara dalam mengelola tata kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang baik. Sebagai akibatnya, bahkan beberapa dari aktivis Islam, mencoba menawarkan gagasan yang sama sekali baru dari apa yang selama ini dipikirkan oleh negara, yaitu sebetulnya solusi yang secara menyeluruh harus berangkat dari paradigma Islam *an sich*, yang lazimnya berangkat dari dua sumber Islam yaitu Alquran dan Sunnah. Namun, ada pula dari aktivis Islam yang lebih toleran dan fleksibel dengan gagasan yang selama ini dipikirkan oleh negara, dalam tataran itu, respon yang dilakukan aktivis tipikal ini, hanyalah sebatas kritik dan saran yang membangun namun tidak keluar dari mainstream pemikiran dan paradigma Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aktivis Islam yang responnya lebih reaksioner terhadap negara, lazimnya muncul dari organisasi keagamaan yang boleh dikatakan baru, atau paling tidak dari organisasi masyarakat (ormas) yang muncul paska rezim Soeharto lengser dari kekuasaan Presiden bulan Mei tahun 1998, seperti MMI, HTI, FPI, dan gerakan Tarbiyah. Sedangkan, ada pula mereka aktivis Islam yang kecenderungannya hampir tidak jauh berbeda dengan model yang pertama, hanya saja aktivis tipikal ini lahir dari Ormas Islam yang sudah cukup mapan, seperti DDII, LDII, Persis, SI, al-Wasliyah, dan Jamaah Tabligh. Sementara, mereka aktivis Islam yang lebih toleran dan fleksibel, lazimnya muncul dari Ormas Islam yang sudah cukup mapan, yang tradisi serta budayanya sudah sedemikian menyatu dalam kehidupan masyarakat Islam pada umumnya seperti NU dan Muhammadiyah.

Dari titik itu, sudah dapat diketahui, bahwa betapa respon aktivis Islam terhadap persoalan sosial, politik dan ekonomi, sangat memiliki kekhasan tersendiri, dalam pengertian, terdapat perbedaan diantara sekian aktivis gerakan Islam baik dalam mewa-

canakan pendapat serta gagasannya, ekspresi maupun tindakan politiknya, ketika hendak mengaspirasikannya dihadapan negara. Dalam dataran itu, hal ini sebenarnya masih selaras dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, misalnya, oleh Ahmad Baso ketika di antara aktivis Islam berbeda pendapat perihal diskursus *civil society* (masyarakat sipil).¹

Ada yang berpendapat bahwa geneologi masyarakat sipil lahir dari sebetuk pemikiran sekuler dari Barat, sementara jika masyarakat Islam ingin mengadopsinya maka harus menyesuaikan dengan tradisi dan kebudayaan Islam. Namun ada pula yang berpendapat bahwa geneologi masyarakat sipil sebenarnya sudah ada dalam sejarah peradaban Islam, dari titik itu, jika ingin mengadopsinya, maka masyarakat Islam tinggal mengkontekstualisasikannya saja dalam kehidupan mereka yang sebenarnya.²

Perbedaan pandangan, gagasan, ekspresi maupun tindakan ketika aktivis Islam merespon persoalan sosial, politik, dan ekonomi kontemporer, lebih dikarenakan semenjak dulu peta gerakan Islam atau masyarakat Islam itu sendiri di Indonesia sangat beragam dan multikultural, itulah sebabnya dalam pandangan peneliti menyimpulkan bahwa Islam Indonesia sangat warna warni atau tidak tunggal.

Karenanya kategorisasi serta klasifikasi terhadap gagasan, pemikiran, ekspresi serta tindakan dari aktivis Islam menyangkut persoalan sosial, politik, dan ekonomi kontemporer perlu dilakukan, sehingga pemetaan gagasan, pemikiran, ekspresi, dan tindakan dari mereka aktivis Islam bisa diakomodasi ke dalam frame pemikiran yang lebih terintegrasi dan *sustainable*, sehingga dari sekian perbedaan itu bukan terlihat atau nampak terfragmentasi, melainkan melahirkan sebetuk integrasi pemikiran yang bisa

¹ Ahmad Baso, *Civil Society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran "Civil Society" dalam Islam Indonesia*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 60

² Bassam Tibi, terj. Imron Rosyidi dkk, *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 49

memberi kontribusi serta solusi terhadap persoalan-persoalan kenegaraan.

Islam, Politik, dan Demokrasi Indonesia Orde (tanpa) Orde

Semenjak reformasi tahun 1998, bisa dikatakan aspirasi politik masyarakat Islam kian terbuka dan tumbuh dalam peta politik nasional. Kebebasan individu di jaman reformasi menambah keberanian dalam jati diri masyarakat Islam yang diwakili oleh mereka aktivis dari gerakan Islam. Perdebatan diseputar apakah negara Indonesia yang menganut ideologi Pancasila serta menganut sistem demokrasi masih harus dipertahankan paska reformasi tahun 1998? Menjadi perdebatan tersendiri dikalangan aktivis Islam. Terlebih lagi wacana itu dilegitimasi oleh krisis yang datang bertubi-tubi, sementara negara seakan tak berdaya menghadapnya, hingga kini krisis masih terjadi di pelbagai bidang.

Dari sebagian aktivis Islam, khususnya aktivis yang terkatégorisasi reaksioner dan cenderung *emoh* pada negara, menyebutkan bahwa integrasi politik nasional harusnya tidak disatukan oleh ideologi Pancasila, karena ideologi itu kurang memiliki akar dan kekhasan yang kuat dalam masyarakat Indonesia umumnya. Lagi pula, sebagai akibat dari kebijakan negara yang kelewat keluar dari akar-akar tradisi, kebudayaan, serta pemikiran Islam, maka sebagai konsekuensi logis akhirnya krisis di pelbagai bidang tak bisa terelakan lagi. Dari kalangan aktivis tipikal ini, meyakini bahwa dengan kembali pada akar-akar tradisi, kebudayaan dan pemikiran Islam yang khas dan murni, maka Indonesia akan bisa terangkat dari krisis multidimensi.

Demikian pula dengan sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia, bagi aktivis Islam tipikal ini, sistem itu tidak memiliki kekhasan yang kuat dan murni dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat Indonesia, karena sistem itu terlalu mengadopsi dari pemikiran Barat sekuler yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisi, kebudayaan dan pemikiran Islam khususnya.

Sistem jenis itu adalah buatan akal manusia yang memiliki sejumlah kelemahan, apalagi berkelindan dengan kepentingan kapitalisme Barat (Amerika dan sekutunya), sehingga bagi negara-negara yang mengadopsinya, seperti Indonesia, tak akan bisa keluar dari krisis selama masih menggunakan sistem itu, alih-alih bangsa ini akan terjerumus masuk dalam jeratan kapitalisme Barat.

Adapun solusi dalam merespon wacana ideologi nasional, demokrasi dan tata nilai sekuler yang dianut negara-bangsa ini, aktivis Islam yang cenderung reaksioner dan *emoh* pada negara pada intinya terintegrasi dengan sebetuk pemikiran *ushuliyah* Islam (fundamentalisasi pemikiran Islam) yang bersumber dari Alquran dan Sunnah khususnya, sementara jika tidak terdapat dari dua sumber itu maka akan dirujuk dari tradisi dan kebudayaan *salaf al-Shalih* (para pendahulu Islam yang baik). Konsep negara Islam jaman khilafah Islamiyyah, konsep syura (kesepakatan *common platform*) dalam masyarakat umumnya terlebih dalam masyarakat Islam, dan pemikiran-pemikiran mengenai dasar-dasar kenegaraan pada jaman Nabi Muhammad di Madinah, menjadi berlaku umum dan prinsipil dalam wacana yang dikembangkan oleh para aktivis Islam tipikal ini.³

Persis seperti analisis Bassam Tibi yang menyebutkan, bahwa sebagai bentuk respon atas ketidakberdayaan negara dan ketidakadilan globalisasi Barat, maka akhirnya dalam masyarakat Islam itu akan lahir sebetuk gerakan yang cukup massif yang mencoba menawarkan supaya kembali pada ajaran-ajaran fundamental agama. Menurut Tibi, gerakan fundamentalisme Islam, merupakan respon atas sebetuk ketidakadilan global yang masuk dalam negara-negara dengan mayoritas penduduknya muslim. Gerakan fundamentalisme Islam yang salah satunya memiliki ciri-ciri lit-

³ M. Imdadun Rahmat, (et.al.), *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Realitas*, (Jakarta: Erlangga, 2003), 170

eralistik dalam mendekati teks-teks keagamaan, menurut Tibi, berbeda dengan gerakan fundamentalisme keagamaan lainnya, misalnya Hindu, yang hanya berkembang di negara dimana tempat lahir dan hadirnya gerakan fundamentalisme dalam masyarakat Hindu seperti di India, fundamentalisme Islam bersifat transnasional, tak hanya lahir di satu negara, melainkan spiritnya bisa berkembang lintas negara (secara global).⁴

Namun, tak semua aktivis Islam sepakat dengan konsep-konsep yang dikembangkan dan diwacanakan dari aktivis Islam jenis pertama itu. Aktivis Islam jenis kedua ini lazimnya lebih toleran, fleksibel, dan cenderung *sustainable* dengan nilai-nilai pemikiran yang selama ini dikembangkan oleh negara. aktivis tipikal kedua lebih cenderung memberi kontribusi dan masukan solusi pada negara, yang meskipun dirujuk dari teks-teks keagamaan Islam, namun pada intinya perdebatan mengenai ideologi Pancasila dan sistem demokrasi telah dianggap satu keputusan final yang tak bisa diganggu gugat. Dalam dataran itu, meskipun Islam menjadi rujukan pemikiran bagi mereka, ruang lingkup yang lahir dan muncul dari ajaran Islam bukannya tak bisa masuk dalam peta pemikiran politik nasional. Namun bagi aktivis tipikal ini, justru Islam menjadi spirit yang memberi gairah-gairah baru bagi pemikiran negara yang mungkin tengah mengalami kebuntuan dan kemacetan.

Konsep antara Islam dan demokrasi, misalnya, dianggap tak bertentangan, malah sumber-sumber dari ajaran Islam digali secara mendalam sehingga menghasilkan sebuah kerangka berpikir bahwa antara demokrasi dan Islam sangat *comfortable* dan berkesesuaian (to agree within). Demokrasi, bagi aktivis Islam tipikal ini, bukanlah produk Barat dan oleh sebabnya hanya bisa berlaku serta diberlakukan di dunia Barat. Demokrasi bukanlah dimiliki dan diklaim secara sepihak oleh Barat, akan tetapi ia merupakan produk universal bagi tatanan kemanusiaan, termasuk bagi masyarakat Islam itu sendiri. Demokrasi merupakan tata nilai yang

⁴ Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme...*, 82

tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, karena dalam demokrasi terdapat nilai keadilan yang dalam Islam juga diajarkan sebagai dasar dan inti ajaran Islam yang mengajarkan keadilan juga. Demikian pula, meskipun demokrasi bukanlah tujuan, namun demokrasi adalah sebagai sistem kehidupan masyarakat dan negara yang paling mendekati dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

Cara pandang yang diusung oleh aktivis tipikal ini mengenai demokrasi, sebenarnya bukanlah hal baru, melainkan fondasinya sudah dikembangkan oleh beberapa pemikir pembaru Islam, seperti gagasan Rachid Ghannouchi, yang menyebutkan bahwa meskipun dalam dunia Islam terdapat gagasan mengenai sistem kenegaraan, namun pada intinya masyarakat muslim tak menggunakannya dalam bentuk tata kenegaraan mereka, melainkan lebih memilih sistem-sistem yang sudah baku ada dan berlaku umum, seperti demokrasi.⁵ Apalagi, gagasan mengenai Islam dan demokrasi terasa menempati posisinya yang elegan paska perang dingin di dunia Barat hingga pergantian millennium baru semenjak tahun 2000 yang dibuktikan oleh laporan *Freedom in the World 2000*, bahwa demokrasi mendapatkan tempat di dunia Islam.

Perdebatan di dalam kalangan aktivis Islam mengenai dasar negara, konsep demokrasi dan politik di Indonesia, menjadi kian terbuka, terutama terjadi semenjak orde reformasi bergulir bahkan hingga kini, dimana partisipasi politik umat Islam terasa menemukan kembali bentuknya setelah sebelumnya rezim Orde Baru berhasil menekan dan membungkam aspirasi politiknya selama 32 tahun lebih.⁶ Bola perdebatan itu terus bergulir hingga kini, seiring peran negara belum menemukan bentuk formulasi bagi perubahan dan penyelesaian krisis yang berkepanjangan.

⁵ Rachid Ghannouchi, *Partisipasi dalam Pemerintahan Non-muslim*, dalam Charles Kurzman, "Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global", terj. Bahrul Ulum, (Jakarta: Paramadina, 2003), 158

⁶ George Junus Aditjondro, dan Thamrin Amal Tomagola, dalam Alpha Amirrachman (ed.), *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*, (Jakarta: ICIP dan European Commission, 2007), 92

Sementara itu, fragmentasi politik dalam masyarakat muslim justru semakin meluas, dalam pengertian, justru karena orde reformasi dan keterbukaan itulah integrasi politik masyarakat muslim tak bisa terjadi, yang ada di antara mereka para aktivisnya satu sama lain menuding dan mengklaim bahwa aliran dan sekte politiknyalah yang paling baik dibandungkan lainnya. Aktivis FPI, misalnya, menganggap praktik politik HTI tidaklah cukup rasional, sementara begitupula aktivis HTI, menganggap partai-partai politik Islam yang ada semuanya tidak mengaspirasikan Islam dan masyarakat muslim, hanya HTI-lah, menurut aktivisnya, satu-satunya Ormas dan partai politik yang mengaspirasikan Islam dan masyarakat muslim, begitu pula seterusnya. Fragmentasi dikalangan aktivis dan gerakan Islam juga terjadi dalam lingkup metode dakwahnya, dakwah HTI berbeda dengan model dakwah FPI dan gerakan tarbiyah.

Sementara dalam lingkaran aktivis Islam yang “reaksioner” itu saling mendelegitimasi satu sama lainnya, mereka juga menganggap bahwa negara dalam konteks sekarang, tak dianggap sebagai Orde Reformasi, melainkan sebuah Orde (tanpa) Orde, karena mengalami kelimbungan yang luar biasa.⁷ Oleh sebab itulah, para aktivis Islam mencari formulasi bagi kelangsungan negara dan bangsa ini, ada yang masih pro dengan kebijakan-kebijakan negara, tapi ada juga yang mencoba keluar dari mainstream negara, dan mencoba sama sekali menawarkan gagasan dan pemikiran baru dalam politik di Indonesia. Meskipun aktivis tipikal reaksioner masih sangat periferal, namun bukan tak mungkin, gerakan kultural yang dibangun oleh para aktivisnya menjadi lebih massif seiring dengan kondisi negara yang masih limbung dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara- (pelaku politik) kian menipis.

⁷ Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam and Democracy: Dynamics in a Global Context*, (Singapore: Solstice Publishing, 2006), 64

Pergeseran Sosial Islam yang Mengerucut ke Arah Fundamentalisme

Seiring terus berlangsungnya iklim perubahan yang dimulai dari era reformasi, nilai-nilai Islam (sebagai *ushuliyah*) menjadi perbincangan dan prinsip yang lebih mengakar dalam masyarakat Islam di Indonesia, khususnya apa yang selama ini disebut sebagai tumbuhnya gerakan keagamaan yang cenderung fanatis dan fundamentalistik. Pemahaman yang fundamentalistik kian hari kian tumbuh dalam idealisme di sebagian masyarakat Islam di Indonesia. Bahkan pemahaman itu kemudian menjadi seben-tuk gerakan massif yang melandasi munculnya Ormas-ormas keIslaman baru.⁸ Ormas-ormas keIslaman lama dalam wacana politik nasional menjadi semakin termarginalkan, karena digantikan oleh kemunculan Ormas keIslaman baru yang menghiasi di media-media massa.

Meskipun pemahaman fundamentalistik dalam peta sosial masyarakat Islam terasa semakin tumbuh, terutama karena kemunculannya yang menghiasi media-media massa, namun menurut Azyumardi Azra, kaum muslim yang memiliki pemahaman seperti itu, maupun mereka kaum muslim yang tergabung dalam Ormas-ormas Islam yang boleh dikatakan sebagai gerakan fundamentalis, tetap saja hanyalah gerakan perifer dalam masyarakat Islam Indonesia secara menyeluruh.⁹

Pada intinya ciri muslim Indonesia (masih) tetap moderat, dalam pengertian tetap menjalankan syariat Islam sehari-hari, syariat tidak harus distrukturasi ke dalam bentuk aturan kenegaraan yang resmi, akan tetapi dipahami sebagai aturan kultural masyarakat Islam semata, seperti menjalankan shalat setiap hari lima kali, menjalankan puasa di bulan Ramadhan, melakukan haji, menunaikan zakat, dan seterusnya.

⁸ M. Syafii Anwar, *Menggali Akar Kekerasan Atas Nama Agama*, (Makalah Kerja), Seminar Center for Moderate Muslim, 2005, 5

⁹ Azyumardi Azra, *Indonesia Islam and Democracy ...*,143

Namun, periferalisasi aktivis maupun Ormas Islam yang dikategorisasi sebagai gerakan fundamentalis itu, jika terus dibiarkan boleh jadi akan terus bertambah dan ideologisasinya bisa terus membumi dalam masyarakat Islam di Indonesia secara menyeluruh. Dengan bahasa lain, jika penelitian yang sudah dilakukan bahwa fenomena fundamentalisme Islam selama ini cenderung hanya dilihat pada masyarakat muslim perkotaan (*urban society*), boleh jadi jika terus dibiarkan maka ideologisasi gerakannya bisa masuk di wilayah-wilayah muslim pedesaan dan di pesantren-pesantren. Paling tidak ada tiga modus, bagaimana pemahaman fundamentalistik dari perkotaan itu bisa masuk di wilayah-wilayah pedesaan dan pesantren.

Pertama, melalui media massa yang dalam hal itu, pertumbuhan media cetak yang dipublikasi oleh aktivis maupun gerakan fundamentalis, dikemas dengan tema dan wacana yang menarik perhatian banyak kalangan Islam, sehingga bisa menyebar dan mempengaruhi cara berfikir masyarakat Islam umumnya menuju pada cara berfikir yang fanatis dan fundamentalistik. *Kedua*, melalui dakwah-dakwah yang menyebar di ruang-ruang pendidikan, baik di sekolah, kampus maupun pesantren. Pola transmisi ideologis aktivis dan gerakan fundamentalis ialah melalui jalur-jalur kultural di bidang pendidikan. *Ketiga*, melalui aktivitas politik, dimana aktivis dan gerakan fundamentalis lazimnya masuk dalam dunia politik dan ambisinya adalah merebut suara masyarakat Islam seluas-luasnya. Pola aktivitas politik yang dilakukan, biasanya digabungkan atau difermentasikan dengan kegiatan-kegiatan dakwah yang mampu memasuki ruang-ruang publik masyarakat Islam secara lebih luas.¹⁰

Pemahaman fundamentalistik, terutama yang selama ini diusung oleh para aktivis Islam fundamentalis, misalnya, menganggap negara tak bisa menyelesaikan problematika krisis so-

¹⁰ M. Imdadun Rahmat, (et.al.), *Islam Pribumi ...*, 124

sial, seperti bahwa kemiskinan, kebodohan, serta “penyakit masyarakat” lainnya (soal prostitusi, diskotik, penyalahgunaan Narkoba yang meluas) tak bisa diselesaikan, bahkan keadaannya bertambah buruk, oleh karena negara tidak memberlakukan aturan-aturan yang berangkat dari ajaran Islam. Negara mestinya kembali pada sumber dan spirit ajaran Islam, jika menginginkan perubahan yang signifikan bagi pengentasan masalah sosial tersebut.¹¹

Karena Islam tidak menjadi spirit dan sumber bagi tatanan kenegaraan, bagi aktivis Islam fundamentalis, oleh sebab itulah dalam birokrasi dan departemen pemerintahan masih berjalan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang membuat negara dan bangsa ini terus dilanda secara bertubi-tubi oleh pelbagai krisis sosial, ekonomi dan politik. Urusan publik terbengkalai, kesejahteraan tak didapatkan, keadilan tak dirasakan, karena adanya korupsi. Korupsi terjadi karena tidak adanya kepastian hukum, tidak adanya ketegasan hukum, karena hukum yang digunakan oleh negara ini, menurut aktivis Islam fundamentalis, adalah hukum yang tidak dijalankan berdasarkan syariat Islam.

Para aktivis Islam fundamentalis juga menganggap, negara tak mengaspirasikan faktor Islam dalam kebijakan publik. Faktor Islam dianggap dimarginalisasikan oleh negara, baik dalam kehidupan nasional bahkan internasional. Sebaliknya, negara dianggap terlalu mengakomodasi kepentingan-kepentingan Barat. Dari situlah, menurut kalangan aktivis Islam fundamentalis, sumber dari segala sumber bencana yang dialami negara dan bangsa ini. Menurut Azyumardi Azra, dengan mengutip Hasjim Djalal, faktor Islam yang dimarginalisasikan oleh negara, baik di tingkat nasional maupun internasional, terjadi akibat para pembuat kebijakan (decision maker) dalam negara itu sendiri diorganisasi oleh para birokrat yang lazimnya lahir dari kalangan politik yang ber-

¹¹ *Ibid*, 127

garis nasionalis sekuler atau politikus yang berangkat dari agama tertentu selain Islam.¹²

Oleh karena itu juga, “keberpihakan” negara, misalnya dalam kasus-kasus kekerasan di pelbagai daerah seperti di Poso, Ambon, Aceh, dan sebagainya, yang melibatkan masyarakat Islam dengan masyarakat Kristen maupun militer, menurut aktivis Islam fundamentalis, terjadi karena dalam negara itu sendiri terdapat para birokrat yang terkristalisasi dalam menyudutkan Islam.¹³ Mereka “kaum kafir/salibis” tidak senang dengan perkembangan Islam di daerah-daerah seperti Poso, Ambon dan sebagainya, sehingga jalan satu-satunya membuat kerusuhan sosial dan seterusnya, dalam rangka untuk meredam perkembangan Islam di daerah tersebut.

Jalan keluar yang ditawarkan para aktivis Islam secara menyeluruh, karenanya, tak hanya meredam kerusuhan secara kultural di daerah konflik tersebut, misalnya dengan mengangkat isu-isu kearifan lokal (*local wisdom*), dan seterusnya, akan tetapi bagaimana negara juga memiliki peran strategis di daerah konflik. Sebab menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh George Junus Aditjondro, negara juga memiliki kepentingan politik di daerah-daerah konflik tersebut. Begitu pula menurut Thamrin Amal Tomagola, proposisi para pemimpin di daerah yang menginginkan konflik masih jauh lebih besar, ketimbang para pemimpin di daerah yang menginginkan damai. Hal itu terjadi, karena dengan adanya konflik, maka “produksi ekonomi” yang dihasilkan dari konflik tersebut jumlahnya sangat besar, baik itu karena proyek-proyek damai yang nanti akan diberikan oleh negara, maupun bisnis-bisnis lain yang timbul karena adanya konflik tersebut.

Oleh sebab itulah, integrasi sosial masyarakat Islam dalam soal kasus-kasus kekerasan di pelbagai daerah yang melibatkan

¹² Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam and Democracy ...*, 49

¹³ George Junus Aditjondro, *Revitalisasi Kearifan Lokal ...*, 120

masyarakat Islam di sana, pada intinya bisa terjadi. Meskipun pemahaman dan praktik tindakannya saja yang berbeda, namun integrasi sosialnya berhasil terjadi. Misalnya, antara aktivis NU, Muhammadiyah, Persis, al-Washliyah dan aktivis FPI, HTI serta gerakan tarbiyah, integrasi sosial mereka dalam melihat kasus kekerasan itu sangat solid, bahwa semua aktivis Islam merasa prihatin dalam melihat masyarakat Islam di daerah konflik tersebut, oleh karenanya harus dibantu baik secara diplomasi, moral maupun material. Yang membedakan diantara mereka, aktivis FPI, misalnya, merasa terpanggil untuk langsung terjun ke lapangan membantu masyarakat Islam di daerah konflik, sedangkan bagi aktivis NU atau Muhammadiyah, berupaya melakukan konsolidasi, pengkajian mendalam, serta diplomasi dengan negara dan seterusnya dalam melihat konflik tersebut.¹⁴

Demikian, terjadinya pergeseran sosial Islam yang menuju ke arah fundamentalisme, terpicu karena beberapa hal. *Pertama*, karena ketidakpercayaan terhadap negara. Negara dianggap sangat korup karena dijalankan oleh roda birokrasi yang sudah keluar dari nilai-nilai Islam. Korupsilah sebagai sumber mala petaka dan krisis yang dialami bangsa Indonesia.

Kedua, karena Islam tidak menjadi faktor signifikan dalam strukturasi negara. Islam tidak dianggap sebagai sumber dan spirit bagi penyelesaian pelbagai krisis yang menimpa bangsa ini. Sehingga, misalnya, terjadinya penyakit-penyakit sosial yang melanda masyarakat, kian hari kian tumbuh subur, karena tidak adanya tindakan tegas dari negara.

Ketiga, negara terlalu mengakomodasi kepentingan-kepentingan dari Barat (Amerika dan sekutunya) baik dalam persoalan sistem kenegaraan, demokrasi, campur tangan ekonomi dan seterusnya, sedangkan di sisi lain, antara kepentingan Barat dan masyarakat Islam di Indonesia umumnya selalu terjadi kutub

¹⁴ Wawancara dengan Sekjen FPI Shobri Lubis, 17 Pebruari 2015

biner. Tatanan nilai dari Barat, juga diyakini turut menyebarkan nilai-nilai yang amoral dalam masyarakat Islam khususnya, sehingga menjadi kian terpuruk.¹⁵

Pada intinya, respon aktivis Islam secara menyeluruh terhadap persoalan sosial sangat pro pada perubahan, namun perubahan di situ tidak dipahami tunggal, melainkan setiap aktivis Islam memiliki pandangannya tersendiri mengenai apa dan bagaimana perubahan itu harus digagas dan dijalankan. Justru yang dikhawatirkan, dari sebagian aktivis Islam yang menginginkan perubahan itu menganggap bahwa semuanya harus kembali pada sumber-sumber ajaran Islam, sementara menafikan keragaman bangsa Indonesia yang pluralistik dan multikulturalistik. Kecenderungan semacam ini sudah mulai tumbuh dalam masyarakat Islam, yang meskipun masih bersifat perifer, namun harus diredam serta diluruskan pemahamannya, sebab bagaimanapun bangsa Indonesia tidaklah tunggal karena dimukimi oleh beragam etnis, suku bangsa, agama yang berbeda-beda. Justru pemahaman Islam yang berwawasan nasional-lah yang semestinya harus dikembangkan, karena aktivis Islam yang demikian dapat memberi kontribusi yang riil terhadap persoalan sosial-kenegaraan yang terjadi dalam tubuh bangsa ini.

Penolakan terhadap Globalisasi, Kapitalisme dan Agen-agen Ekonomi Barat

Tesis Bassam Tibi yang menyebutkan bahwa lahirnya gerakan fundamentalisme Islam salah satunya diakibatkan karena penolakan (resistensi) terhadap globalisasi, nampaknya masih sangat relevan untuk menjawab persoalan ini.¹⁶ Globalisasi bukan hanya ditolak di dunia Islam karena praktiknya dalam kehidupan sosial, melainkan semenjak semula masyarakat Islam sudah kadung negatif terhadap suatu hal yang datang dari Barat. Segala produk

¹⁵ Wawancara dengan Sekjen FPI Shobri Lubis...

¹⁶ Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme...*, 98

yang datang dari Barat, terutama dalam pandangan aktivis Islam yang cenderung memiliki pemahaman fundamentalistik, akan ditolak mentah-mentah. Kompromisasi terhadap produk-produk globalisasi dari Barat, sama dengan sebetulnya hipokrisi, yang menurut mereka, bertentangan dengan ajaran Islam.

Oleh sebab itu pula, sebenarnya, bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara dengan negara-negara Barat (Amerika dan sekutunya) selalu mendapat tentangan dari aktivis Islam tipikal itu. kerjasama dengan negara-negara Barat diyakini tak akan mendapat berkah serta keuntungan bagi negara ini, yang ada hanyalah eksploitasi yang ekstrem terhadap kekayaan alam Indonesia. Respon yang dilakukan oleh aktivis HTI, misalnya, selalu menekankan supaya jangan sampai negara ini melakukan kerjasama dalam bentuk apapun, terutama kerjasama ekonomi, dengan negara-negara Barat (Amerika dan sekutunya), karena yang terjadi sebetulnya eksploitasi kekayaan alam, seperti di Freeport, kasus Exxon Mobil, dan seterusnya.¹⁷

Sebaliknya, aktivis Islam tipikal itu menyarankan kepada negara, supaya bekerjasama dengan negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Brunai, Malaysia, Mesir, Palestina, Iran dan seterusnya. Selain secara kultural, antara negara-negara Islam tersebut dan negara Indonesia sama-sama memiliki jumlah penduduk dengan mayoritas Islam, juga karena kedekatan kebudayaan yang pada intinya berangkat dari kebudayaan Islam, sehingga diharapkan bentuk kerjasama ekonomi pun akan berpatokan pada dimensi keadilan, bukan eksploitasi.¹⁸

Hubungan antara aktivis Islam yang cenderung fundamentalistik dan perwakilan negara-negara Barat di Indonesia jelas terjadi demarkasi yang cukup diametral. Bahkan sejumlah kegiatan asing yang beroperasi di Indonesia, mendapat perhatian

¹⁷ Wawancara dengan Aktivis HTI, 24 Januari 2015

¹⁸ *Ibid*

tersendiri oleh aktivis Islam semacam itu. Misalnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LSM-LSM di Indonesia, baik yang berorientasi pada sosial maupun keagamaan, yang kerjasamanya dilakukan dengan lembaga-lembaga *think-thank* Amerika dan sekutunya, seperti TAF, Asia Foundation, dan seterusnya, selalu dicurigai sebagai agen-agen Barat untuk mencari informasi tentang seluk-beluk Islam dan keIndonesiaan, untuk kemudian, menurut keyakinan aktivis Islam tipikal itu, dieksploitasi dari dalam.¹⁹

Itulah sebabnya, pengalaman sebagai peneliti ketika melakukan wawancara dengan para tokoh maupun aktivis Islam yang cenderung fundamentalistik, selalu akan menanyakan kepada peneliti tersebut perihal untuk apa dan siapa yang berada dibalik penelitian itu? Kadang stereotip yang membabi-butakan langsung ditujukan, sehingga nara sumber yang akan diwawancara tersebut menolak untuk diwawancara. Atau bahkan tak hanya menolak untuk diwawancara, bahkan nara sumber mencurigai bahwa peneliti yang akan mewawancara tersebut adalah benar-benar agen asing, misalnya, dia bertanya, “anda anak buah Sydney Jones yah?”

Keberadaan aktivis dari gerakan Islam semacam itulah, yang mungkin, misalnya, pemerintah Amerika merasa curiga dan perlu bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan prevensi terhadap gerakan Islam garis keras, mereka kelompok radikal, maupun teroris yang selama ini selalu membuat huru-hara keamanan. Pemerintah Amerika merasa bahwa di Indonesia merupakan ladang bagi gerakan radikal yang akan melahirkan para teroris, sehingga misalnya, merasa perlu untuk mengintervensi membuat kurikulum bagi sekolah-sekolah Islam maupun pesantren supaya pandangan-pandangan keagamaannya menjadi lebih terbuka.

Meskipun untuk sementara kalangan, menyebutkan bahwa pemerintah Amerika salah alamat jika mengaitkan terorisme dan

¹⁹ M. Syafii Anwar, *Menggali Akar ...*, 3

Islam, terutama pada masyarakat Islam di Indonesia. Karena masyarakat Islam Indonesia sangat toleran, ramah dan moderat. Walaupun ada masyarakat Islam yang terlibat dalam aksi-aksi terorisme, hal itu hanyalah praktik menyimpang dari ajaran Islam, dan biasanya pelakunya terkait dengan modus-modus kepentingan ekonomi. Tak ada akar-akar kekerasan dalam masyarakat muslim di Indonesia, karena dalam sejarah masuk pertamakalinya Islam di bumi Nusantara ialah melalui dakwah dan perdagangan, berbeda kondisi itu dengan pola penyebaran Islam di Timur Tengah, misalnya, yang dilakukan dengan cara ekspedisi militer para pahlawan-pahlawan Islam.²⁰

Aktivis Islam secara generik dalam persoalan ekonomi menolak jika dilakukan kerjasama dengan agen-agen kapitalisme Barat (Amerika dan sekutunya). Sebisa mungkin, negara tak melakukan kerjasama ekonomi dengan negara-negara Barat. Kondisi itu berbeda dengan aktivis Islam liberal di Indonesia, yang cenderung lebih *sustainable* dan pada intinya menerima dengan gagasan-gagasan ekonomi liberal *a la* Barat. Bahkan dalam hal ini, ada *jokes* tersendiri yang dibuat kalangan liberal yang ditujukan kepada aktivis Islam yang cenderung fundamentalistik, bunyinya: “kapitalisme haram, tapi dolarnya halal...”²¹

Bagi aktivis Islam yang fundamentalistik, krisis ekonomi yang melanda bangsa ini, terkait karena adanya intervensi yang ekstrem dari negara-negara Barat (Amerika dan sekutunya). IMF dan World Bank biasanya dua institusi yang pertama kali harus dipersalahkan, yang diyakini akibat utang-utang yang diberikannya kepada negara, kemudian menyebabkan keterpurukan ekonomi, oleh sebab itu, pemutusan hubungan dengan dua institusi itu, bagi aktivis Islam umumnya, harus segera dilakukan oleh negara.

²⁰ M. Syafii Anwar, *Menggali Akar Kekerasan...*, 8

²¹ Bruce B. Lawrence, *Menepis Mitos: Islam di Balik Kekerasan* (Terj.) Harimukti Ba-goes Oka, (Jakarta: Serambi, 2002), 173

begitu pula, negara harus keluar dari keanggotaan APEC, GAT, kebijakan Freetrade, atau apapun modus ekonomi yang bersumber dari Barat.²²

Ketidakpercayaan terhadap Barat, sebenarnya bukan hanya diyakini bahwa segala bentuk kerjasama pasti akan merugikan bangsa ini, melainkan karena sentimen ideologis-keagamaan, dimana tesis benturan antar peradaban di sini menjadi berlaku. Bahwa Barat adalah peradaban Judeo-Kristiani yang sedari dulu sudah bermusuhan dengan Islam, karena mereka tidak rela agama Islam menjadi besar, hal itu kemudian dilandasi pula dengan keberadaan teks kitab suci yang kurang lebih menyebutkan bahwa “kaum Yahudi dan Nasrani tak akan rela kepada kaum muslim hingga kaum muslim mengikuti millah mereka” (Q.S., 2:120).

Kesadaran ideologis-keagamaan itulah yang sebenarnya menjadi titik mula (*starting point*) yang kemudian menimbulkan krisis kepercayaan aktivis Islam terhadap segala hal yang datang dari Barat. Sehingga, misalnya, sebuah botol pun, karena produk Barat, maka akan dikategorisasikan sebagai barang yang haram. Pandangan subjektif itu terjadi bukan karena botol adalah barang yang haram, melainkan karena semenjak semula pandangan aktivis Islam yang cenderung fundamentalistik tentang Barat sudah sangat stereotip.²³

Keadaan itu akan berbeda dengan, misalnya, ketika aktivis Islam tipikal itu menilai segala sesuatu yang datang dari negarane-negara Arab, pasti akan positif. Karena Islam merasa pertama kali datang dari dunia Arab, maka seakan-akan antara Islam dan Arab tak bisa dipisahkan. Sehingga, segala produknya pun akan dikatakan halal, termasuk budaya dan tradisinya akan terasa *sustainable* dengan tradisi dan budaya masyarakat Islam di Indonesia.

²² Wawancara dengan Aktivist Persis, 16 Maret 2015

²³ Bruce B. Lawrence, *Menepis Mitos ...*

Kesimpulan

Berdasarkan hasil riset wawancara di lapangan, yang mencoba melihat respon aktivis gerakan Islam terhadap persoalan sosial, politik dan ekonomi kontemporer ini, ada beberapa catatan penting sebagai kesimpulannya.

Pertama, aktivis dari gerakan Islam kini harus dikategorisasikan lagi, mengingat semenjak reformasi tahun 1998, dimana iklim kebebasan menjadi terbuka, kemudian menyulut tumbuh suburnya gerakan Islam baru yang bahkan berbeda karakter gerakannya dengan gerakan Islam yang lama. Pada intinya, aktivis gerakan Islam yang baru cenderung reaksioner, bahkan ada yang menyebut “kaki tangan” dari gerakan wahabi di Arab Saudi (salafi radikal). Munculnya beragam aktivis dari gerakan Islam baru itu, saling berbeda perihal pandangan politik dan pendekatan dakwahnya. HTI, misalnya, berbeda dengan gerakan Tarbiyah seperti PKS, begitu juga keduanya berbeda dengan FPI.

Kedua, aktivis dari gerakan Islam lama seperti DDII, LDII, SI, al-Washliyah, memang sama reaksionernya dengan aktivis dari gerakan Islam yang baru, yang membedakannya, aktivis dari gerakan ini pada intinya tidak mengaktualisasikannya dalam bentuk politik praktis, seperti membuat partai atau melakukan tindakan anarkis-militan di lapangan. Namun sebenarnya pandangan keagamaan, pandangan politik dan dakwahnya tidak jauh berbeda dengan aktivis dari gerakan Islam baru, yang pada intinya menginginkan tegaknya Islam di bumi nusantara.

Ketiga, agak berbeda dengan aktivis dari gerakan Islam tersebut di atas, aktivis dari NU dan Muhammadiyah memiliki corak dan dinamikanya tersendiri, yang pada intinya sepakat dengan ideologi negara. Meskipun mengkritik kebijakan negara, namun masih dalam bingkai keIndonesiaan seperti yang selama ini dipahami. Integrasi politik masyarakat NU dan Muhammadiyah dengan negara, umumnya terpelihara karena secara historis kedua Ormas

itu adalah organisasi kemasyarakatan yang tidak berpolitik, jika-pun berpolitik tidak atas nama institusi melainkan atas nama individu. Oleh sebab itulah, sebenarnya akar-akar kemoderatan Islam Indonesia lahir dari kedua Ormas ini, kedua Ormas ini sangat penting untuk memediasi ekstremitas baik datang dari negara, kekuatan Barat (Amerika dan sekutunya), maupun dari gerakan Islam di Indonesia yang cenderung fundamentalistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, George Junus, dan Thamrin Amal Tomagola, dalam Alpha Amirrachman (ed.), *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*, Jakarta: IICIP dan European Commission, 2007
- Anwar, M. Syafii, *Menggali Akar Kekerasan Atas Nama Agama*, (Makalah Kerja), Seminar Center for Moderate Muslim, 2005
- Azra, Azyumardi, *Indonesia, Islam and Democracy: Dynamics in a Global Context*, Singapura: Solstice Publishing, 2006
- Baso, Ahmad, *Civil Society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran "Civil Society" dalam Islam Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999
- Esposito, John L., dan John O. Voll, *Islam and Democracy*, New York: Oxford University Press, 1996
- Ghannouchi, Rachid, *Partisipasi dalam Pemerintahan Non-muslim*, dalam Charles Kurzman, "Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global", terj. Bahrul Ulum, Jakarta: Paramadina, 2003
- Lawrence, Bruce B., *Menepis Mito: Islam di Balik Kekerasan*. terj. Harimukti Bagoes Oka, Jakarta: Serambi, 2002
- Rahmat, M. Imdadun, (et.al.), *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Realitas*, Jakarta: Erlangga, 2003
- Tibi, Bassam, *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*, terj. Imron Rosyidi dkk, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000